



Pengaruh Implementasi *E-Procurement* terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

Fendy Aprilian Pamungkas^{1*}, Farida Yuliaty², Widjajanti Utoyo³

¹⁻³ Universitas Sangga Buana Ypkp, Indonesia

Email: fendyaprilian@gmail.com¹, farida.yuliaty@usbypkp.ac²

*Penulis Korespondensi: fendyaprilian@gmail.com

Abstract. Digital transformation in public sector management encourages organizations to implement electronic procurement (*e-procurement*) systems to improve efficiency, transparency, and accountability in financial management. This study aims to analyze the implementation of *e-procurement* and examine its effect on transparency and accountability in medical equipment procurement at TK IV 15.07.01 Ternate Hospital. This research employed a quantitative approach with a survey design. Data were collected through questionnaires distributed to 78 respondents involved in the medical equipment procurement process. Data analysis was conducted using the Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) method through measurement model evaluation, structural model evaluation, and hypothesis testing. The results indicate that the implementation of *e-procurement* has a positive and significant effect on procurement transparency, with a coefficient of determination (R^2) value of 0.758. Furthermore, *e-procurement* implementation also has a positive and significant effect on procurement accountability, with an R^2 value of 0.731. These findings demonstrate that electronic procurement systems contribute to improving information openness, administrative efficiency, process traceability, and the quality of financial accountability in medical equipment procurement management. This study implies that optimizing *e-procurement* implementation requires strengthening information technology infrastructure, improving human resource competencies, and enhancing institutional policies to establish transparent, accountable procurement governance aligned with good governance principles.

Keywords: Accountability; *E-Procurement*; Medical Equipment Procurement; SEM-PLS; Transparency.

Abstrak. Transformasi digital dalam pengelolaan sektor publik mendorong organisasi untuk menerapkan sistem pengadaan berbasis elektronik (*e-procurement*) guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *e-procurement* serta menguji pengaruhnya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit TK IV 15.07.01 Ternate. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 78 responden yang terlibat dalam proses pengadaan alat kesehatan. Analisis data dilakukan menggunakan metode *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS) melalui evaluasi model pengukuran, model struktural, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengadaan alat kesehatan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,758. Selain itu, implementasi *e-procurement* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengadaan dengan nilai R^2 sebesar 0,731. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengadaan elektronik mampu meningkatkan keterbukaan informasi, efisiensi administrasi, keterlacakan proses, serta kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pengadaan alat kesehatan. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa optimalisasi *e-procurement* perlu didukung melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan kebijakan organisasi untuk mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Kata Kunci: Akuntabilitas; *E-Procurement*; Pengadaan Alat Kesehatan; SEM-PLS; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital dalam sektor publik menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas tata kelola administrasi. Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan proses birokrasi yang sebelumnya dilakukan secara

manual menuju sistem yang lebih terintegrasi, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah penerapan *electronic procurement* (*e-procurement*) yang bertujuan menciptakan sistem pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan mampu mengurangi risiko penyimpangan dalam penggunaan anggaran publik (LKPP, 2021).

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) karena melibatkan nilai anggaran yang besar, hubungan antara pengguna anggaran dan penyedia barang/jasa, serta adanya kemungkinan ketidakseimbangan informasi. Implementasi *e-procurement* menjadi instrumen strategis untuk mengurangi risiko tersebut melalui digitalisasi seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pelaporan. Sistem ini menghasilkan jejak digital (*digital trail*) yang memungkinkan proses pengadaan lebih mudah diawasi dan diaudit secara objektif (Handayani, Santoso, & Utomo, 2018).

Meskipun telah diterapkan secara nasional, efektivitas *e-procurement* masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada sektor kesehatan dan wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital. Data Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2024 menunjukkan bahwa Provinsi Maluku Utara memperoleh skor 71 dengan kategori “baik”, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, serta dukungan infrastruktur teknologi informasi (LKPP, 2024). Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan sistem elektronik belum sepenuhnya menghilangkan permasalahan pengadaan, seperti keterlambatan distribusi, ketidaktepatan perencanaan, dan kendala operasional dalam penggunaan sistem elektronik (Lestari, 2022; Pura, 2023).

Dalam konteks wilayah timur Indonesia, tantangan implementasi *e-procurement* menjadi semakin kompleks akibat kondisi geografis, keterbatasan jaringan internet, serta rendahnya literasi digital pengguna sistem. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap optimalisasi penerapan sistem pengadaan elektronik, khususnya pada rumah sakit yang memiliki kebutuhan pengadaan alat kesehatan secara berkelanjutan. Rumah Sakit TK IV 15.07.01 Ternate sebagai rumah sakit militer sekaligus fasilitas pelayanan kesehatan publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan alat kesehatan yang tepat waktu, sesuai spesifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi *e-procurement* pada rumah sakit tersebut menjadi penting untuk mengetahui kontribusinya terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan alat kesehatan.

Pengadaan alat kesehatan memiliki karakteristik khusus karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan medis dan keselamatan pasien. Ketersediaan alat kesehatan yang sesuai kebutuhan klinis sangat menentukan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan. Namun, proses pengadaan alat kesehatan sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan distribusi, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, serta risiko ketidakefisienan anggaran apabila proses pengadaan tidak dilakukan melalui sistem pengawasan yang memadai (Utami & Nugroho, 2019).

Penerapan *e-procurement* diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan tersebut melalui mekanisme pengadaan berbasis teknologi yang terdokumentasi, mudah ditelusuri, dan dapat diawasi oleh pihak internal maupun eksternal. Fitur seperti *e-tendering*, *e-purchasing*, dan *e-contracting* memungkinkan setiap proses pengadaan tercatat secara sistematis sehingga dapat meminimalkan manipulasi data, penyalahgunaan kewenangan, maupun ketidaksesuaian dokumen pengadaan (Setiawan, 2022). Selain itu, sistem ini juga dapat memperluas kesempatan bagi penyedia barang/jasa untuk mengikuti proses pengadaan secara lebih kompetitif sehingga mendukung efisiensi biaya dan peningkatan kualitas barang yang diperoleh rumah sakit (Wibowo, 2021).

Keberhasilan implementasi *e-procurement* tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh kemampuannya dalam mendukung prinsip *good governance*, khususnya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai proses, prosedur, dan keputusan pengadaan kepada pihak yang berkepentingan. Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan pengelola pengadaan dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan sumber daya publik. Sistem *e-procurement* yang terintegrasi dapat memperkuat mekanisme pengawasan melalui pencatatan aktivitas, dokumentasi elektronik, dan *audit trail* terhadap setiap tahapan pengadaan (Putri & Hidayat, 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui gambaran awal implementasi *e-procurement*, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit TK IV 15.07.01 Ternate. Hasil studi pendahuluan digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi kondisi penerapan sistem pengadaan elektronik sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

Tabel 1. Studi Pendahuluan Variabel *E-Procurement* (X).

Dimensi	Skor Dominan	Persentase
Perencanaan pengadaan elektronik	Skor 4	40,0%
Proses pemilihan penyedia secara elektronik	Skor 4	43,3%
Pelaksanaan kontrak secara elektronik	Skor 4	36,7%

Monitoring dan evaluasi berbasis sistem Skor 4 40,0%

Sumber: Studi penelitian terdahulu, 2026.

Tabel 2. Studi Pendahuluan Variabel Transparansi (Y1).

Dimensi	Skor Dominan	Persentase
Keterbukaan informasi pengadaan	Skor 4	46,7%
Aksesibilitas informasi bagi publik	Skor 4	40,0%
Kejelasan prosedur pengadaan	Skor 4	50,0%
Ketepatan waktu penyampaian informasi	Skor 4	43,3%

Sumber: Studi penelitian terdahulu, 2026.

Tabel 3. Studi Pendahuluan Variabel Akuntabilitas (Y2).

Dimensi	Skor Dominan	Persentase
Kejelasan tanggung jawab pengelola	Skor 4	46,7%
Kepatuhan terhadap regulasi	Skor 4	50,0%
Pelaporan dan dokumentasi kegiatan	Skor 4	40,0%
Evaluasi dan pengawasan kinerja	Skor 4	43,3%

Sumber: Studi penelitian terdahulu, 2026.

Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* di Rumah Sakit TK IV 15.07.01 Ternate telah berjalan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terlihat dari dominasi jawaban responden pada kategori skor 3 dan 4 pada variabel implementasi *e-procurement*, transparansi, dan akuntabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat peluang pengembangan terutama dalam aspek optimalisasi sistem, peningkatan kompetensi pengguna, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi.

Selain permasalahan implementasi, penelitian mengenai *e-procurement* pada rumah sakit militer di wilayah timur Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada instansi pemerintahan umum atau wilayah perkotaan dengan dukungan infrastruktur yang lebih baik. Rumah sakit militer memiliki karakteristik organisasi yang berbeda karena dipengaruhi oleh struktur birokrasi, regulasi internal, dan kebutuhan pelayanan yang spesifik. Oleh sebab itu, penelitian mengenai pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap transparansi dan akuntabilitas pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit TK IV 15.07.01 Ternate menjadi penting untuk memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan tata kelola pengadaan berbasis digital pada sektor kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap transparansi dan akuntabilitas pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit TK IV 15.07.01 Ternate.

2. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian bertujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh antarvariabel secara empiris melalui pengukuran data numerik yang diperoleh dari responden. Penelitian ini menganalisis pengaruh implementasi *e-procurement* sebagai variabel independen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengadaan alat kesehatan sebagai variabel dependen pada Rumah Sakit TK IV 15.07.01 Ternate.

Menurut Creswell (2014), pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti melakukan pengukuran hubungan antarvariabel secara objektif melalui instrumen penelitian yang terstruktur sehingga menghasilkan data yang dapat dianalisis menggunakan metode statistik. Dalam penelitian ini, variabel implementasi *e-procurement* diukur melalui indikator sistem aplikasi pengadaan, keterbukaan informasi, kemudahan akses, dan kecepatan proses. Sementara itu, transparansi diukur melalui keterbukaan informasi pengadaan, akses terhadap dokumen pengadaan, serta keterlacakan proses, sedangkan akuntabilitas diukur melalui pertanggungjawaban administratif, mekanisme pengadaan, serta pelaporan dan audit yang dapat ditelusuri.

Analisis data dilakukan menggunakan metode *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS). Metode ini dipilih karena mampu menguji hubungan antar konstruk laten secara simultan dan sesuai digunakan pada penelitian dengan jumlah sampel relatif terbatas serta tidak mensyaratkan distribusi data normal. Evaluasi model dilakukan melalui pengujian model pengukuran (*outer model*), model struktural (*inner model*), dan pengujian hipotesis.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit TK IV 15.07.01 Ternate yang berlokasi di Jalan A.I.S Nasution No. 2, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Rumah sakit ini merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh TNI AD di bawah Kesdam XV/Pattimura dan memiliki fungsi pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI, PNS, keluarga besar TNI, serta masyarakat umum di wilayah Maluku Utara.

Rumah Sakit TK IV 15.07.01 Ternate memiliki berbagai layanan medis, termasuk pelayanan umum, gigi, penyakit dalam, bedah, kebidanan, anak, saraf, rehabilitasi medik, mata, THT, kulit dan kelamin, serta instalasi gawat darurat yang beroperasi selama 24 jam. Sebagai institusi pelayanan publik, rumah sakit memiliki kewajiban menerapkan prinsip *good*

governance, terutama dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan sistem *e-procurement* dalam proses pengadaan alat kesehatan.

Subjek penelitian adalah pegawai yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit TK IV 15.07.01 Ternate. Responden dipilih karena memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait pelaksanaan sistem *e-procurement*, transparansi proses pengadaan, serta mekanisme pertanggungjawaban pengadaan alat kesehatan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data berbentuk angka yang diperoleh melalui pengukuran variabel penelitian dan digunakan untuk analisis statistik (Creswell, 2014). Data penelitian diperoleh melalui instrumen kuesioner dengan skala Likert lima tingkat, yaitu skor 5 untuk jawaban “sangat setuju” hingga skor 1 untuk jawaban “sangat tidak setuju”.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner mengenai implementasi *e-procurement*, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan alat kesehatan. Data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung seperti laporan pengadaan alat kesehatan, kebijakan internal rumah sakit, dokumen administrasi bagian tata usaha, serta informasi dari pejabat struktural yang berkaitan dengan proses pengadaan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit TK IV 15.07.01 Ternate. Jumlah populasi penelitian sebanyak 78 orang yang terdiri atas pegawai yang berperan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan alat kesehatan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh (*census sampling*), yaitu seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian. Teknik ini dipilih karena jumlah populasi relatif terbatas sehingga seluruh anggota populasi dapat dijangkau untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi *e-procurement* dalam pengadaan alat kesehatan. Dengan demikian, jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 78 responden.

Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri atas satu variabel independen yaitu implementasi *e-procurement* (X) dan dua variabel dependen yaitu transparansi (Y1) serta akuntabilitas (Y2). Operasionalisasi variabel digunakan sebagai dasar penyusunan instrumen penelitian.

Tabel 4. Operasional Variabel Penelitian.

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
<i>E-Procurement</i> (X)	Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta integritas sistem pengadaan (Vaidya, Sajeev, & Callender, 2006)	1. Efisiensi biaya 2. Transparansi/keterbukaan informasi 3. Kesiapan organisasi dan pengguna 4. Kepuasan pemangku kepentingan	Ordinal
Transparansi (Y1)	Ketersediaan informasi yang relevan, mudah diakses, dan dapat dipahami publik mengenai penggunaan sumber daya publik (Mulyati et al., 2023)	1. Ketersediaan dan keterbukaan informasi 2. Ruang diskusi publik 3. Proses pengelolaan yang terbuka 4. Dokumentasi dan data pendanaan	Ordinal
Akuntabilitas (Y2)	Kewajiban pengelola dana publik untuk mempertanggungjawabkan hasil kegiatan sesuai aturan dan standar yang berlaku (Afifah & Faturrahman, 2021)	1. SOP yang terimplementasi 2. Sistem pengawasan internal 3. Mekanisme pertanggungjawaban 4. Penyusunan laporan tahunan 5. Evaluasi kinerja dan sistem <i>reward-punishment</i>	Ordinal

Sumber: Data Diolah, 2026.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu kuesioner, observasi, dan studi dokumentasi. Kuesioner digunakan sebagai instrumen utama penelitian yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel dengan menggunakan skala Likert. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan *e-procurement* di lingkungan rumah sakit, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa laporan pengadaan, SOP *e-procurement*, dan struktur organisasi pengadaan.

Data hasil kuesioner kemudian dianalisis menggunakan SEM-PLS untuk menguji hubungan antarvariabel laten, sedangkan data hasil observasi dan dokumentasi digunakan untuk memperkuat interpretasi hasil penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu analisis statistik deskriptif, evaluasi model pengukuran (*outer model*), evaluasi model struktural (*inner model*), dan pengujian hipotesis.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik responden serta kecenderungan jawaban terhadap indikator penelitian melalui nilai frekuensi, persentase, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

Evaluasi *outer model* dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator penelitian. Pengujian validitas konvergen dilakukan melalui nilai *loading factor* dan *Average Variance Extracted* (AVE), dengan kriteria *loading factor* $\geq 0,70$ dan AVE $\geq 0,50$. Reliabilitas konstruk diuji menggunakan nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*.

Selanjutnya, evaluasi *inner model* digunakan untuk mengetahui hubungan antarvariabel laten melalui nilai koefisien determinasi (R^2), *effect size* (F^2), serta pengujian hipotesis menggunakan teknik *bootstrapping*. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap transparansi dan akuntabilitas pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit TK IV 15.07.01 Ternate.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan sebanyak 78 responden yang merupakan pegawai Rumah Sakit TK IV 15.07.01 Ternate yang memiliki keterlibatan dalam proses pengadaan alat kesehatan. Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lama bekerja. Karakteristik tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai profil responden yang memberikan penilaian terhadap implementasi *e-procurement*, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan alat kesehatan.

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	34	43,6%
2	Perempuan	44	56,4%
	Jumlah	78	100%

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 5, responden penelitian didominasi oleh perempuan sebanyak 44 orang (56,4%), sedangkan responden laki-laki sebanyak 34 orang (43,6%). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pegawai perempuan dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan cukup besar, terutama dalam aktivitas administrasi dan operasional sistem pengadaan elektronik.

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.

No	Rentang Usia	Frekuensi	Persentase
1	<25 tahun	6	7,7%
2	25–35 tahun	30	38,5%
3	36–45 tahun	37	47,4%
4	>45 tahun	5	6,4%
	Jumlah	78	100%

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kelompok usia 36–45 tahun sebanyak 37 orang (47,4%). Selanjutnya responden usia 25–35 tahun sebanyak 30 orang (38,5%). Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada

usia produktif dan telah memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam memahami proses pengadaan alat kesehatan dan penggunaan sistem *e-procurement*.

Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	SMA/SMK/Sederajat	7	9%
2	D4/S1	31	39,7%
3	S2	33	42,3%
4	S3	7	9%
	Jumlah	78	100%

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tingkat pendidikan, responden paling banyak memiliki pendidikan terakhir S2 sebanyak 33 orang (42,3%), kemudian D4/S1 sebanyak 31 orang (39,7%). Tingkat pendidikan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kemampuan akademik yang memadai untuk memahami prosedur dan kebijakan pengadaan berbasis elektronik.

Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.

No	Lama Bekerja	Frekuensi	Persentase
1	<1 tahun	7	9%
2	1–5 tahun	26	33,3%
3	6–10 tahun	38	48,7%
4	>10 tahun	7	9%
	Jumlah	78	100%

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan lama bekerja, responden paling banyak memiliki masa kerja 6–10 tahun yaitu sebanyak 38 orang (48,7%). Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga mampu memberikan penilaian terhadap penerapan sistem *e-procurement* dan tata kelola pengadaan alat kesehatan.

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Implementasi E-Procurement (X)

Pengukuran variabel implementasi *e-procurement* dilakukan berdasarkan persepsi responden terhadap efektivitas sistem elektronik dalam mendukung proses pengadaan alat kesehatan.

Tabel 9. Pendapat Responden Mengenai Implementasi E-Procurement (X).

No	Indikator Pernyataan	Skor Panel	Rata-rata
1	Proses pengadaan elektronik membantu menekan biaya operasional	327	4,19
2	Penggunaan <i>e-procurement</i> mengurangi pemborosan anggaran	330	4,23
3	Informasi proses dan tahapan pengadaan dapat diakses secara terbuka	320	4,10
4	Dokumen pengadaan melalui sistem elektronik mudah dipahami	325	4,16
5	SDM rumah sakit memiliki kompetensi menjalankan sistem	328	4,20
6	Sarana dan prasarana pendukung tersedia dengan baik	321	4,11
7	Sistem mempermudah proses pengadaan barang/jasa	325	4,16
8	Sistem menjawab kebutuhan pemangku kepentingan	322	4,12
	Jumlah	2595	4,16

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 9, variabel implementasi *e-procurement* memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,16 yang termasuk kategori sangat baik. Indikator dengan nilai tertinggi terdapat pada penggunaan *e-procurement* dalam mengurangi pemborosan anggaran dengan nilai rata-rata 4,23. Sementara indikator dengan nilai terendah adalah keterbukaan akses informasi proses pengadaan dengan nilai rata-rata 4,10.

Transparansi Pengadaan Alat Kesehatan (Y1)

Tabel 10. Pendapat Responden Mengenai Transparansi (Y1).

No	Indikator Pernyataan	Skor Panel	Rata-rata
1	Informasi anggaran pengadaan dapat diakses dengan jelas	313	4,01
2	Dokumen perencanaan dan realisasi tersedia terbuka	322	4,13
3	Rumah sakit menyediakan wadah aspirasi	321	4,12
4	Terdapat saluran komunikasi terbuka	323	4,14
5	Pemilihan penyedia dilakukan secara terbuka	326	4,18
6	Tahapan pengadaan diinformasikan secara transparan	322	4,13
7	Dokumen pendukung terdokumentasi dengan baik	316	4,05
8	Informasi sumber pendanaan tersedia	324	4,15
	Jumlah	2567	4,11

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi memperoleh nilai rata-rata 4,11 dan berada pada kategori baik. Nilai tertinggi terdapat pada keterbukaan proses pemilihan penyedia barang/jasa sebesar 4,18. Sementara itu, indikator akses informasi anggaran memperoleh nilai paling rendah yaitu 4,01.

Akuntabilitas Pengadaan Alat Kesehatan (Y2)

Tabel 11. Pendapat Responden Mengenai Akuntabilitas (Y2).

No	Indikator Pernyataan	Skor Panel	Rata-rata
1	Pengadaan mengikuti SOP	327	4,19
2	SOP tersedia secara tertulis	323	4,14
3	Tim pengawas internal aktif	318	4,08
4	Kontrol internal berjalan konsisten	324	4,15
5	Unit menyusun laporan pertanggungjawaban	335	4,29
6	Pelaporan penggunaan anggaran dilakukan berkala	314	4,03
7	Laporan tahunan disusun jelas	321	4,12
8	Laporan tahunan dapat diakses	329	4,22
9	Kinerja pelaksana dievaluasi rutin	314	4,03
10	Terdapat sistem penghargaan/sanksi	316	4,05
	Jumlah	3221	4,13

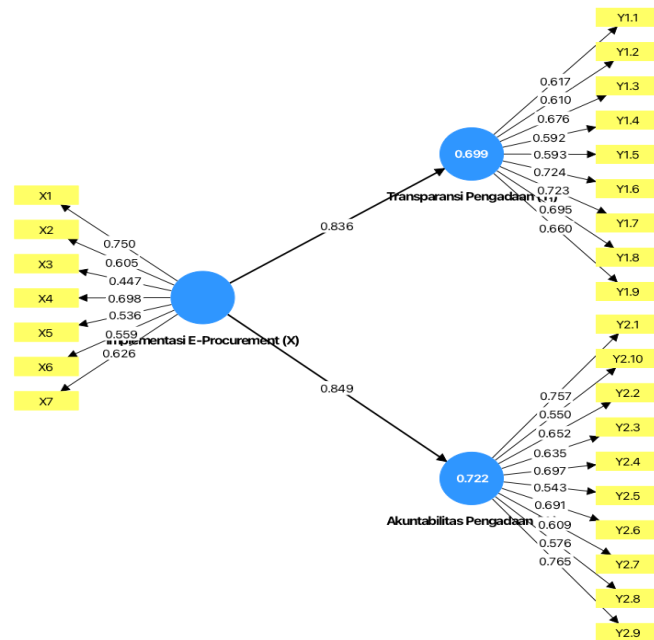
s

Berdasarkan Tabel 11, variabel akuntabilitas memperoleh nilai rata-rata 4,13 dengan kategori baik. Indikator tertinggi terdapat pada kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan nilai 4,29. Sementara indikator terendah terdapat pada pelaporan penggunaan anggaran dan evaluasi kinerja dengan nilai 4,03.

Hasil Analisis SEM-PLS

Evaluasi Outer Model

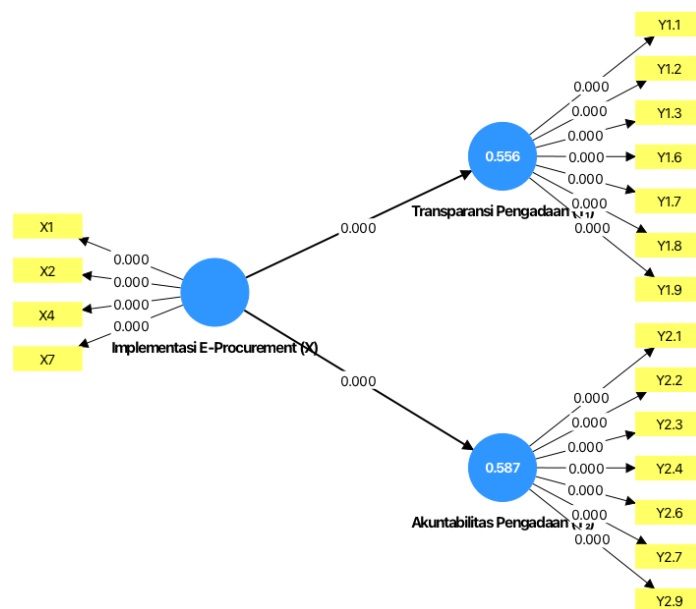
Evaluasi *outer model* dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas indikator penelitian. Pengujian dilakukan melalui nilai *outer loading*, validitas konstruk, serta reliabilitas variabel penelitian.



Gambar 1. Hasil Outer Loading Model Pengukur.

Evaluasi Inner Model

Evaluasi model struktural dilakukan untuk mengetahui kemampuan variabel implementasi *e-procurement* dalam menjelaskan transparansi dan akuntabilitas.



Gambar 2. Model Struktural Penelitian.

Tabel 12. Nilai Koefisien Determinasi (R^2).

Variabel Endogen	Nilai R^2
Transparansi (Y1)	0,758
Akuntabilitas (Y2)	0,731

Sumber: Data diolah, 2026

Nilai R^2 menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* mampu menjelaskan sebesar 75,8% variasi transparansi pengadaan alat kesehatan dan 73,1% variasi akuntabilitas pengadaan alat kesehatan.

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengadaan alat kesehatan serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengadaan alat kesehatan.

Tabel 13. Hasil Pengujian Hipotesis.

Hipotesis	Hubungan Variabel	Hasil
H1	Implementasi <i>e-procurement</i> → Transparansi	Positif dan signifikan
H2	Implementasi <i>e-procurement</i> → Akuntabilitas	Positif dan signifikan

Sumber: Data diolah, 2026

Pembahasan

Analisis Deskriptif Implementasi E-Procurement, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengadaan Alat Kesehatan

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement*, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit TK IV 15.07.01 Ternate berada pada kategori baik. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengadaan berbasis elektronik telah mampu mendukung proses pengadaan yang lebih terstruktur, terdokumentasi, serta mendukung prinsip tata kelola organisasi yang baik. Penelitian ini melibatkan 78 responden yang terlibat dalam proses pengadaan alat kesehatan, dengan pengukuran dilakukan terhadap persepsi responden mengenai implementasi sistem, keterbukaan proses pengadaan, serta mekanisme pertanggungjawaban pengadaan.

Variabel implementasi *e-procurement* memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,16. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sistem pengadaan elektronik telah diterapkan secara efektif dalam mendukung aktivitas pengadaan alat kesehatan. Responden menilai bahwa penggunaan sistem elektronik mampu meningkatkan efisiensi proses pengadaan, mengurangi potensi pemborosan anggaran, serta membantu penyediaan informasi yang lebih mudah ditelusuri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *e-procurement* tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi digital, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian yang dapat meningkatkan kualitas proses pengadaan.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep *good governance* yang menempatkan teknologi informasi sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas organisasi publik. Melalui sistem elektronik, setiap tahapan pengadaan dapat terdokumentasi secara sistematis sehingga mempermudah proses pengawasan dan evaluasi. Dalam konteks penelitian ini, penerapan *e-procurement* menjadi faktor pendukung dalam mengurangi keterbatasan sistem pengadaan manual yang berpotensi menimbulkan permasalahan administrasi maupun kurangnya keterbukaan informasi.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aspek keterbukaan akses informasi masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *e-procurement* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemudahan akses pengguna, kesiapan sumber daya manusia, serta kualitas informasi yang tersedia dalam sistem. Dengan demikian, optimalisasi sistem perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan pengguna dan penyempurnaan mekanisme penyediaan informasi agar manfaat *e-procurement* dapat dirasakan secara maksimal.

Pada variabel transparansi pengadaan alat kesehatan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,11. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses pengadaan di Rumah Sakit TK IV 15.07.01 Ternate telah berjalan dengan tingkat keterbukaan yang baik. Penerapan sistem elektronik memberikan dukungan terhadap transparansi melalui penyediaan dokumen, informasi tahapan pengadaan, serta pencatatan proses yang dapat ditelusuri.

Transparansi merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan pengadaan publik karena berkaitan dengan keterbukaan informasi dan kemampuan pihak berkepentingan dalam melakukan pengawasan. Sistem *e-procurement* memungkinkan informasi pengadaan tersimpan secara digital sehingga mengurangi ketergantungan pada dokumen manual yang sulit ditelusuri. Kondisi tersebut mendukung terciptanya proses pengadaan yang lebih objektif dan mengurangi peluang terjadinya penyimpangan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek akses informasi anggaran masih memiliki nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penyajian informasi pengadaan menjadi salah satu aspek penting untuk memperkuat transparansi.

Selanjutnya, variabel akuntabilitas pengadaan alat kesehatan memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,13. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proses pengadaan telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pertanggungjawaban administratif, kepatuhan terhadap prosedur, serta

mekanisme pelaporan dan pengawasan. Responden menilai bahwa keberadaan sistem elektronik membantu memastikan setiap aktivitas pengadaan memiliki dokumentasi yang jelas sehingga memudahkan proses evaluasi dan audit.

Penerapan *e-procurement* mendukung akuntabilitas karena setiap aktivitas dalam sistem menghasilkan jejak digital (*digital trail*) yang memungkinkan proses pengadaan ditelusuri kembali. Hal ini memperkuat mekanisme pengawasan internal dan memberikan dasar yang lebih kuat dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pengadaan alat kesehatan. Hasil penelitian ini mendukung temuan bahwa sistem pengadaan elektronik mampu meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan melalui peningkatan kontrol administratif dan keterlacakan proses.

Secara keseluruhan, hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan alat kesehatan. Namun, efektivitas sistem tetap membutuhkan dukungan organisasi berupa peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan sistem.

Analisis Verifikatif Pengaruh Implementasi E-Procurement terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Analisis verifikatif dilakukan menggunakan metode *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS) untuk menguji hubungan antara implementasi *e-procurement* sebagai variabel independen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengadaan alat kesehatan sebagai variabel dependen. Metode SEM-PLS digunakan karena mampu menganalisis hubungan antarvariabel laten secara simultan melalui evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Penelitian ini menggunakan data dari 78 responden yang terlibat dalam proses pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit TK IV 15.07.01 Ternate.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediksi yang baik. Nilai koefisien determinasi (R^2) pada variabel transparansi sebesar 0,758 menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* mampu menjelaskan sebesar 75,8% variasi transparansi pengadaan alat kesehatan. Sementara itu, nilai R^2 pada variabel akuntabilitas sebesar 0,731 menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* mampu menjelaskan sebesar 73,1% variasi akuntabilitas pengadaan alat kesehatan.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* memiliki kontribusi yang kuat dalam membentuk transparansi dan akuntabilitas pengadaan. Sistem elektronik mampu meningkatkan keterbukaan proses karena informasi pengadaan dapat dicatat, disimpan,

dan ditelusuri secara sistematis. Selain itu, sistem ini juga memperkuat akuntabilitas karena setiap tahapan pengadaan memiliki bukti administratif yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pemeriksaan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengadaan alat kesehatan. Artinya, semakin baik penerapan sistem *e-procurement*, maka semakin tinggi tingkat transparansi dalam proses pengadaan. Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi proses pengadaan mampu meningkatkan keterbukaan informasi, mengurangi asimetri informasi, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pihak terkait untuk melakukan pemantauan terhadap proses pengadaan.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa teknologi informasi dalam pengadaan publik bukan hanya berfungsi sebagai alat percepatan administrasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian tata kelola. Melalui sistem elektronik, proses perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga dokumentasi dapat dilakukan secara lebih terbuka dan terdokumentasi.

Selain berpengaruh terhadap transparansi, implementasi *e-procurement* juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengadaan alat kesehatan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sistem elektronik mampu meningkatkan kemampuan organisasi dalam mempertanggungjawabkan setiap proses pengadaan. Dokumentasi digital yang tersedia dalam sistem membantu organisasi melakukan pengawasan, evaluasi, serta audit terhadap penggunaan anggaran.

Temuan ini memiliki implikasi bahwa keberhasilan penerapan *e-procurement* tidak hanya diukur dari efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga dari kemampuannya memperkuat mekanisme pertanggungjawaban organisasi. Dalam lingkungan rumah sakit, khususnya rumah sakit militer seperti Rumah Sakit TK IV 15.07.01 Ternate, aspek akuntabilitas menjadi sangat penting karena pengadaan alat kesehatan berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan kesehatan dan penggunaan sumber daya publik.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan sistem pengadaan elektronik dapat meningkatkan transparansi, efisiensi administrasi, dan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam proses pengadaan. Dengan demikian, implementasi *e-procurement* dapat dipandang sebagai strategi manajerial untuk memperkuat prinsip *good governance* dalam pengelolaan pengadaan alat kesehatan.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi *e-procurement* memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit TK IV 15.07.01 Ternate. Oleh karena itu, keberlanjutan sistem perlu didukung melalui peningkatan kompetensi pengguna, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta penyempurnaan kebijakan internal agar sistem dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap transparansi dan akuntabilitas pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit TK IV 15.07.01 Ternate, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-procurement* telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola pengadaan. Implementasi sistem pengadaan berbasis elektronik mampu mendukung efisiensi proses, meningkatkan keteraturan administrasi, serta mempermudah akses terhadap informasi pengadaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengadaan alat kesehatan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,758, yang menunjukkan bahwa sebesar 75,8% variasi transparansi dapat dijelaskan oleh implementasi *e-procurement*. Selain itu, implementasi *e-procurement* juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengadaan alat kesehatan dengan nilai R^2 sebesar 0,731, sehingga menunjukkan bahwa 73,1% variasi akuntabilitas dapat dijelaskan oleh penerapan sistem tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa *e-procurement* memiliki peran strategis dalam memperkuat keterbukaan informasi, meningkatkan kualitas dokumentasi, memperjelas mekanisme pertanggungjawaban, serta mendukung proses audit dan pengawasan pengadaan alat kesehatan. Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa rumah sakit perlu melakukan optimalisasi implementasi *e-procurement* melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan keamanan sistem, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan sistem berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan integrasi antara sistem elektronik dengan mekanisme pengawasan internal diperlukan agar risiko kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan. Dari sisi akademis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai digitalisasi tata kelola pengadaan sektor kesehatan, khususnya dalam konteks rumah sakit militer di wilayah timur Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas model penelitian dengan memasukkan variabel lain seperti kompetensi sumber daya manusia, sistem

pengendalian internal, budaya organisasi, dan regulasi pengadaan, serta melakukan kajian pada institusi kesehatan atau sektor publik lainnya agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi *e-procurement*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., & Faturrahman, A. (2021). Akuntabilitas pengelolaan keuangan publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 12(2), 115–126.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Handayani, P. W., Santoso, H. B., & Utomo, W. H. (2018). Implementasi e-procurement dalam meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Sistem Informasi*, 14(2), 101–112.
- Kurniawan, T., & Wicaksono, A. (2019). Penerapan prinsip *good governance* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 55–66.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2021). *Pedoman dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik*. Jakarta: LKPP.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2024). *Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2024*. Jakarta: LKPP.
- Lestari, D. (2022). Implementasi sistem e-procurement dalam pengadaan obat pada rumah sakit daerah. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 11(2), 85–94.
- Manik, J., & Baramuli, D. (2021). Tantangan implementasi digitalisasi pelayanan publik di wilayah timur Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 44–56.
- Mulyati, S., et al. (2023). Transparansi pengelolaan sumber daya publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan. *Jurnal Governance*, 8(1), 20–32.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Prasetya, R., & Wulandari, D. (2022). Tata kelola pengadaan pada organisasi kesehatan militer: Tantangan dan strategi implementasi. *Jurnal Manajemen Pertahanan*, 8(2), 75–87.
- Pura, A. (2023). Evaluasi implementasi e-procurement dalam pengadaan obat di rumah sakit khusus paru. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 11(1), 45–57.
- Putri, R., & Hidayat, M. (2020). Digitalisasi pengadaan publik dan penguatan transparansi serta akuntabilitas organisasi pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(3), 201–214.
- Rahman, F., & Dewi, N. (2020). Faktor penghambat implementasi teknologi informasi dalam organisasi publik. *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, 18(2), 90–102.
- Santosa, B. (2021). Reformasi birokrasi melalui sistem pengadaan elektronik dalam perspektif *good governance*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 33–45.
- Sari, D., & Utama, R. (2021). Analisis pengadaan alat kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 24(2), 100–110.

- Setiawan, A. (2022). Implementasi e-procurement sebagai strategi peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 120–132.
- Siregar, R. H., & Mahardika, A. (2021). Kontrak elektronik dalam sistem e-procurement: Tinjauan yuridis dan praktis di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(2), 112–125.
- Sumantri, H. (2023). Transparansi dalam perspektif teori keagenan dan legitimasi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 50–61.
- Thai, K. V. (2001). Public procurement re-examined. *Journal of Public Procurement*, 1(1), 9–50.
- Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. (2018). *Information Technology for Management: On-Demand Strategies for Performance, Growth and Sustainability*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Utami, F., & Nugroho, D. (2019). Analisis pengadaan alat kesehatan dan tantangannya di rumah sakit daerah. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 8(3), 72–84.
- Utami, L. A., & Nugroho, H. A. (2019). Manajemen pengadaan barang dan jasa di sektor publik: Tantangan dan solusi dalam era digitalisasi. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6(2), 112–123.
- Vaidya, K., Sajeev, A. S. M., & Callender, G. (2006). Critical factors that influence e-procurement implementation success in the public sector. *Journal of Public Procurement*, 6(1–3), 70–99.
- Wibowo, D. (2021). Implementasi e-procurement dalam meningkatkan efisiensi biaya pengadaan. *Jurnal Sistem Informasi Publik*, 13(1), 101–114.
- Wibowo, R. A. (2021). E-procurement sebagai sarana reformasi birokrasi: Studi kasus pada pengadaan alat kesehatan di instansi pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(2), 98–107.
- Woods, R. (2021). *Organizational Transparency and Trust*. New York: Springer.
- Yafizham, A., & Daulay, A. (2023). Keterbukaan informasi publik sebagai upaya transparansi pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(2), 78–86.
- Yuliana, N., & Prabowo, H. (2020). Implementasi e-procurement dan dampaknya terhadap pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 199–210.
- Yusuf, A. (2023). Dampak e-procurement terhadap kepercayaan publik di sektor kesehatan. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 11(2), 89–102.